

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Korporasi yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA di Papua yang dilakukan oleh PT. Freeport mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Adapun pelanggaran HAM tersebut adalah Pertama, perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, yang merupakan salah satu sumber utama dari memburuknya kualitas hidup yang dialami oleh suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Moni, dan Mee. Dimana yang paling menonjol adalah pencemaran akibat limbah (*tailing*) yang berkait erat dengan masalah ekologis. Kedua, pelanggaran hak-hak pekerja, dimana PT. Freeport melakukan pemecatan secara sepihak/PHK terhadap pekerja-pekerjanya.
- 5.1.2 Tanggung jawab korporasi dalam rangka memulihkan dan/atau mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Papua yang dilakukan oleh PT. Freeport, baik tanggung jawab terhadap masyarakat di Papua (komunitas), tanggung jawab terhadap lingkungan, maupun tanggung jawab terhadap buruh/pekerja tidak mencerminkan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagaimana dilansir oleh Lokataru dan WALHI. Namun, meskipun demikian PT. Freeport telah memiliki AMDAL apabila dilihat dari sisi tanggung jawab terhadap lingkungan.

5.2 Saran

- 5.2.1. – Bagi perusahaan, kiranya perusahaan melaksanakan komitmennya untuk memastikan perlakuan dan kondisi kerja yang baik bagi lingkungan, serta memastikan kondisi kerja yang adil bagi karyawan/pekerja.
- Bagi pemerintah, kiranya pemerintah Indonesia tanggap untuk melaksanakan kewajibannya, yakni untuk melindungi (*to protect*), untuk menghormati (*to respect*), dan untuk melakukan pemulihan terhadap hak-hak yang dilanggar oleh perusahaan (*the obligation for remedy*).
- 5.2.2. – Bagi perusahaan, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah yakni (1) adanya mengadakan komitmen kebijakan (*policy commitment*) yang mendukung tanggung jawab menghormati HAM salah satunya komitmen perusahaan untuk TJSL/CSR; (2) menjalankan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) secara terus-menerus untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi dan menghitung dampak HAM; (3) memiliki proses-proses yang memungkinkan remediasi (*remediation*) bagi dampak yang mengurangi HAM atas aktivitas dan kontribusi bisnis mereka.
- Bagi pemerintah, kiranya pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan transisi yang berkeadilan (*transitional justice*) bagi orang Papua dan lingkungan hidup. Dalam proses tersebut, maka ada kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah pemulihan lingkungan hidup yang telah dicemari dan dihancurkan, terlebih di

berbagai negara, pembuangan limbah tailing ke laut.

- Bagi negara dan perusahaan, kiranya untuk seterusnya dapat bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyusun praktik dan kebijakan soal kegiatan bisnis perusahaan di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Raoef Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia Di Provinsi Papua: Tambang Dan Pengelolaan Lingkungannya*, Jakarta: Aksara Karunia, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdullah Yazid, *Demokrasi dan HAM*, Malang: Averroes Press, 2007.
- Adrianus Bintang Hanto, *Kekuatan Modal Dan Perilaku Kekerasan Negara Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Freeport*, Jakarta: UKSW, 2011.
- Adzkar Ahsinin, Hirebertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, dan Wahyu Wagiman, *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: ELSAM, 2016.
- _____, *Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta: ELSAM, 2019.
- Agus Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonnisia, 2005.
- Al Araf, Aliabbas, Anton Manto, Ardi, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*, Jakarta: Imparsial, 2011.

Allard K. Lowenstein, *Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control*, New York: Yale University, 2004.

Ali Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.

Alma Bukhari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Amiruddin A. Dajaan Imami, (eds), *Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan: Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing, 2013.

Amiruddin & Aderito Jesus de Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi.

Andreas Bieler, Bruno Ciccaglione, John Hilary, Ingemar Lindberg, *Free Trade and Transnational Labour*, London: Routledge, 2015.

Andri Sri, *Hukum Dagang*, Makasar: Mitra Wacana Media, 2014.

Baskara T. Wardaya, *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 2007.

Benarda Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Jakarta: Kompas, 2012.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta: Aksara, 2014.

Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Brian Orend, *Human Rights: Concept and Context*, North America: Broadview Publisher, 2002.

Bruce Wyman, *The Special Law Governing Public Service Corporations, and All Others*, Washington: BeardBooks, 2011.

C. Force, *Putting Conscience into Commerce: Strategies for Making Human Rights Business as Usual*, Montreal: International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1997.

Carmel Budiardjo dan Liem Soie Liong, *West Papua, The Onliteration of a People*, London: Tapol, 1984.

Clyde W. Barrow. "Ralph Miliband and the Instrumentalist Theory of the State: The (Mis) Construction of and Analytic Concept" dalam Paul Wetherly, et.al, *Class, Power, and the State in Capitalist Society, Essays on Ralph Miliband*, New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Dedi Kurnia, *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, *Konsepsi HAM di Indonesia*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995.

Dorothea Rosa Herliany, *Isinga: Roman Papua*, Jakarta: Gramedia, 2015.

Eibe Riedel, Gilles Giacca, and Christophe Golay, *Economic, Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges*, Oxford: Oxford University Press, 2014.

Fransiscans Internasional dan ICP, *Human Rights in West Papua 2013*, Jerman: ICP, 2013.

Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

George Sabine, *A History of Political Theory*, London: CO Ltd., 1995.

Graham Dunkley, *Free Trade: Myths, Realities, and Alternatives*, London: Zed Books, 2004.

Gunawan, “Tentang TNC dan HAM”, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice*, 2007.

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Justisia, 2009.

Hasan Ismail, *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Bandung: Ikopin, 1989.

HMN Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Ifdhal Kasim, *Menjangkau Tanggung Jawab Perusahaan*, Jakarta: ELSAM, 2017.

Iman Prihandono dan Rully Sandra, *Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Infid, 2018.

Inisiatif Bisnis dan HAM, *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati HAM: Suatu Alat Panduan bagi Perusahaan*, Indonesia: Global Compact Network, 2010.

Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: Setara Press.

Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.

James Mayall dan Gene M. Lyons, “Human Rights and International Politics”, dalam Gene M. Lyons dan James Mayall (ed.), *International Human Rights in the 21 st Century; Protecting the Rights of Groups*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003.

Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Jedrej George Frynas and Scott Pegg, *Transnational Corporations and Human Rights*, New Jersey: Palgrave Macmillan, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Joseph E. Stiglitz's. "Panel on Defending Human Rights (revised)", Geneva, December 3, 2013.

Kirsten Martin, *Information Technology, Private Actors, and the Responsibility to Protect*, dalam John Forrer and Conor Seyle, *The Role of Business in the Responsibility to Protect*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Komnas HAM, *Gambaran Umum Kondisi HAM di Indonesia*, Laporan Tahunan KOMNAS HAM Tahun 2017, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017.

_____, Keterangan Pers No. 010/Humas/KH/VII/2019.

Komnas HAM dan ELSAM, *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM*, Jakarta: KOMNAS HAM, 2017.

Komnas HAM RI, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM; Tinjauan Teori dan Prinsip-prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2006.

Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Larry Arnhart, *Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature*, Queensland: SUNY Press.

Lester B Stone, *War and the Market Economy*, London: Alpha Editions, 2017.

LSE Human Rights, “Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip PBB mengenai Bisnis dan HAM dalam Pembuatan Kebijakan Investasi”, *Buku Saku LSE Human Rights*, 2018.

Lydia Morris, “Social Rights, Trans-National Rights and Civic Stratification”, dalam Lydia Morris (ed.), *Rights; Sociological Perspectives*, New York: Routledge, 2006.

M.H. Syed, *Human Rights; the Global Perspective*, New Delhi: Reference Press, 2003.

M. T. Kamminga dan S. Zia Zafiri (eds.), *Liability of Multinational Corporations under International Law*, The Hague: Kluwer Law International, 2000.

Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes*, Utrecht: Intersentia, 2001.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Manfred Nowak, “Pengantar Pada Rezim HAM Internasional”, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003.

Manisuli Senyonjo, *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Oxford: Hart Publishing, 2016.

Manoj Kumar, *Business and Human Rights*, London: SAGE Publications, 2013.

Marilang, *Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan*, Makassar: Program Pasca Sarjana UNHAS, 2010.

- Markos Karavias, *Corporate Obligations Under International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 2001.
- Mia Mahmudur, *Code of Conduct on Transnational Corporations: Challenges and Opportunities*, Singapore: Springer, 2019.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indoneisa*, Bandung: Alumni, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistesinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, *Pengantar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Cet. Keempat, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Nasir Qadri, *The Basic Right of Self Determination*, Islamabad: International Islamic University, 2018.
- Olufemi Amao, *Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law*, London: Routledge, 2011.
- Patricia Ringiwarti, *Business and Human Rights in Indonesia: From Principles to Practices*”, Jakarta: Human Rights Resource Centre, 2015.
- Penny Green dan Tony Ward, *State Crime; Governments, Violence and Corruption*, London: Pluto Press, 2004.

- PT. Freeport, “Dari Hulu Hingga Ke Hilir”, *Berita Satu Freeport Indonesia*, Edisi 240, 2014.
- _____, “Nilai Inti Kami”, *Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, 2014.
- _____, “Voluntary Principles on Security and Human Rights 2018 Annual Report to the Plenary”, *Voluntary Report on Due Dilligence*, 2018.
- R. Sullivan and D. Hogan, *The Business Case for Human Rights-The Amnesty International Perspective*, 2001.
- Ralph Miliband, *Parliamentary Socialism: A Study in Politics of Labor*, United Kingdom: Merlin Press, 1972.
- Reinier Kraakman, et.al, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Roger Miller dan Gaylord Jentz, *Cengage Advantage Books: Business Law Today: The Essential*, USA: South-Western, 2011.
- Ross Clarke, *Studi kasus Ringkasan Eksekutif Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh*, di tulis untuk ICTJ Imparsial, Kontras, 11 April 2011.
- Rudhy Prasetya, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ruteil G. Teitel, *Transisional Justice*, alih bahasa oleh Eddie Riyadi Terre, Cet. ke-1, Jakarta: EISAM, 2004.
- Sarah Joseph, *Corporation and Transnational Human Rights Litigation*, Hart Publishing: Portland Oregon, 2004.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara di Indonesia, 2003.

- Soedargo S. Gautama, Komala Lumanau, Liz Asnahwati, *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri-Edi Swasono, *Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bappenas, 2008.
- Stephen M, *Corporate Law and Economics*, United States: Foundation Press, 2012.
- Steven R Ratner, *Perusahaan dan HAM: Sebuah Teori Hukum Tanggung Jawab (Corporation and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility)*, Yale: Yale University Press, 2001.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Surya Deva, *Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business*, London: Routledge, 2012.
- Tina J. Park and Victor MacDiarmid, *Selling R2P: Time for Action*, dalam John Forrer and Conor Seyle, *The Role of Business in the Responsibility to Protect*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Torry Kuswardono dan Siti Maimunah, *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa "Menjajah Indonesia"*, Jakarta: WALHI-JATAM, 2006.
- Upendra Baxi, *The Future of Human Rights*, Oxford: Oxford University Press, Second Edition, 2008.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Penerbit UNILA, 2007.

Wahyu Wagiman, *Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan*, ELSAM, 2012.

Wesley Cragg, *Ethics Codes, Corporations, and the Challenge of Globalization*, USA: Glensanda House, 2005.

Widiada Gunakarya, *Hukum HAM*, Yogyakarta: Andi, 2017.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 1977.

B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Kunci Aksara, 2014.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan atas Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.

C. Jurnal, Makalah

Adrianus Bintang Hanto Nugroho, "Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara pada Masa Order Baru dan Pasca Order Baru: Studi Kasus Freeport", *Artikel dan Tulisan Ilmiah UKSW*, 2010

Agustina Poli, "Meaning Of Work And Work Ethos Amungme in PT. Freeport Indonesia in The District Mimika", *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Volume 5, Issue 05, May 2016.

Ahmad Redi, "Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016.

Alexandra J. C. Gatto, "The European Union and Corporate Social Responsibility: Can the EU Contribute to the Accountability of Multinational Enterprises for Human Rights?", Working Paper No. 32, Institute for International Law, K. U. Leuven Faculty of Law, September 2000.

Andrew Clapham, "Categories of Corporate Complicity in Human Rights Abuses," *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 24, Issue 3, Spring 2001.

Anton Pradjasto, "Instrumen HAM dan Konsep Tanggung Jawab Negara", *Koleksi Publikasi ELSAM*, 2014.

Asep Mulyana, "Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan", *Jurnal HAM*, Vol 8, 2012.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Lindung", *Laporan BPHN*, 2013.

Catharina Dewi Wulansari, “Dimensi Baru Peran pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 3, Juli 2006.

D. Faruwu, “Penetapan Community Development Pada Program CSR PT. Freeport Indonesia”, *Ejournal UAJY*, 2016.

Eddie Sius Riyadi, “Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional”, *Jurnal Dignitas*, Vol. V No. II, 2008.

_____, *Human Rights Violation in the Palm Oil Plantation PT PP Lonsum Tbk-North Sumatera*, Jakarta: ELSAM, 2010.

Eli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2012.

Erny Yoesry, "Divestasi PT. Freeport Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 49, No.1, 2019.

F. Umar, "Judicial Commission Supervision for Judges Behaviour in Independent Judiciary", *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 4, Issue 01, January 2015.

Fatwal Fahrunnisa, Rosdianti Razak & Alimuddin Said, “Peran Pemerintah dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT Gunung Mas di Kabupaten Pangkep,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 3, Desember 2017.

FY Hakim, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 1, 2006.

Gamal Abdul Nasir, “Mengawal Pengakuan Dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Ransendatal*, 2018.

- Harga Selangit: Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia”, *Human Rights Watch*, Vol. 18, No. 5(C), 2006.
- Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat, “Diberangus dan Dikorbankan: Laporan mengenai Kondisi Hak Asasi Manusia ribuan pekerja PT. Freeport Indonesia yang Melakukan Pemogokan”, *Laporan Lokataro*, 2018.
- Herlina Astri, "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”, *Pidato, Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 10 November 2001.
- I. Prihandono, “Litigating Economic, Social, Cultural Rights against Transnational Corporations in Indonesian Court”, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 3, Issue. 3, 2017.
- Iman Prihandono dan Rully Sandra, “Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB Tentang Bisnis dan HAM di Indonesia”, *Kertas Kebijakan INFID yang disampaikan di Jakarta*, April 2018.
- International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), “National Action Plans on Business and Human Rights: A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks”, *Buku Saku ICAR*, Juni 2014.
- International Council on Human Rights Policy, “Beyond Voluntarism-Human Rights and the Developing International Legal Obligations of Companies”, Februari 2002.
- Ishviati Joenaeni Koenti, “Implementasi Pedoman PBB dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Vol I*, No. 1, Mei 2016.

- _____, “Implementasi Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- John G. Ruggie, ‘Guiding Principles for the Business & Human Rights Treaty Negotiations: An Open Letter to the Intergovernmental Working Group, Harvard: Kennedy School of Government, 9 October 2018.
- Joko Ismono, “Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2, Issue. 1, 2018.
- KOMNAS HAM, “Jurnal HAM: Komisi Hak Asasi Manusia”, *Jurnal KOMNAS HAM*, Vol. 12, 2016.
- M. Ilham F Putuhena, “Urgensi Pengaturan mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- M. Reksodiputro, “Kejahatan Korporasi: Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 4, 2004.
- Mangara P. Pohan, “Penyelidikan Potensi Bahan Galian pada Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Timika, Provinsi Papua”, *Jurnal ELSAM Kolokium*, 2008.
- Marilang. “Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, *Jurnal Knstitusi*, Vo. 9, No. 2, Juni 2012.
- Methven O’Brien and Olga Martin-Ortega, “National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool”, *Business and Human Rights Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Netty Naiborhu, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT Penanam Modal dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, Vol. 4, No. 1, 2018.

- Paul Gordon Lauren, “First Principles of Racial Equality: History and the Politics and Diplomacy of Human Rights Provisions in the United Nations Charter,” *Human Rights Quarterly*, Vol. 5, 1983.
- Peter Waldman, “Hand in Glove: How Suharto’s Circle, Mining Firm Did So Well Together”, *Wall Street Journal*, 29 September 1998.
- Poengky Indarti, “Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, 2016.
- PT. Freeport, “Voluntary Principles on Security and Human Rights 2018 Annual Report to the Plenary”, *Voluntary Report on Due Dilligence*, 2018.
- Ramlan Surbakti, “Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Universitas Airlangga*, No. 2, April 1999.
- RFK Centre on Human Rights, “Rape and other Human Rights Abuses by Indonesian Military in Irian Jaya (West Papua) Indonesia”, *Robert F Kennedy Memorial Articles*, Mei 1999.
- Sodikin, “Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo”, *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2016.
- Surya Deva, “Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where From Here?”, *Connecticut Journal of International Law*, Vol. 19, 2003.
- Upendra Baxi, “Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: Learning from Bhopal Thirty Plus?”, *Business and Human Rights Journal*, Vol. 1, 2015.
- WALHI, “Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga Emas dan Freeport-Rio Tinto Papua”, *Laporan 25 Tahun WALHI*, Jakarta, 2006.

Yudha Akbar Pally, "The Guiding Principles on Business and Human Rights: Dialektika Perusahaan dan Pemenuhan HAM", *Jurnal Politica*, Vol. 4, No. 1, 2013.

Zainal Abidin, "Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi: Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia", disampaikan pada *Pelatihan Civic Education for Indonesian Leadership "CEFIL"*, Manado, 9 Juli 2012.

D. Konvensi Internasional

International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

International Convention on Civil and Political Rights, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

United Nations Guide Principle on Business and Human Rights, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

E. Sumber Lainnya

Abraham Utama, "Usai Ricuh Mogok Karyawan, Freeport Berkeras Tak PHK Massal", diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41002522> pada tanggal 20 Januari 2020, pkl. 13:45 WIB.

Abrash Abigail, "Human Rights Abuses by Freeport in Indonesia," diakses di <http://laohamutuk.org/Oil/LNG/Refs/002AbrashFreeport.pdf>.

_____, "The Amungme, Kamoro & Freeport: How Indigenous Papuans Have Resisted the World's Largest Gold and Copper Mine," diakses di <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/amungme-kamoro-freeport-how-indigenous-papuans-have>

Aida Mardatillah, "Sejak MK Berdiri, Ini 10 UU yang Banyak Diuji", diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3c74a2844a2/sejak-mk-berdiri--ini-10-uu-terbanyak-diuji/> pada 20 Januari 2020, pkl. 23:03 WIB.

Amiruddin (Komisioner Komnas HAM) dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190716134257-20-412552/komnas-ham-polri-paling-banyak-diadakan-selama-januari-april>, diakses pada tanggal 16 September 2019.

Budiarjo dan Liong, "Papua Barat", Kompas tertanggal 4, 6, dan 7 Oktober 1982.

Carolyn Marr, "Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua selama 22 tahun dengan pendekatan dari atas ke bawah, <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksplorasi-dan-eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah>, diakses pada tanggal 9 November 2019.

Choirul Anwar, "Ini Tindak Lanjut 3 Temuan BPK Sebelum Freeport Balik ke RI", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181219153949-4-47117/ini-tindak-lanjut-3-temuan-bpk-sebelum-freeport-balik-ke-ri>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020, pkl. 23:05 WIB

CNN Indonesia, "Saat Hak Buruh Jadi Nomor Dua Demi Investasi", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190125163840-92-363939/saat-hak-buruh-jadi-nomor-dua-demi-investasi>, diakses pada tanggal 01 November 2019.

Dea Anugrah, "Freeport di Papua ialah Warisan Daripada Soeharto", <https://tirto.id/freeport-di-papua-ialah-warisan-daripada-soeharto-cjrC>, diakses pada tanggal 22 September 2019.

DPR Indonesia, "PT Freeport Indonesia harus Tuntaskan Temuan BPK", <http://dpr.go.id/berita/detail/id/21459/t/PT.+Freeport+Indonesia+Harus+Tuntaskan+Temuan+BPK> diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

Fajar R. Wirasandjaya, "Sejarah Papua dan Startegi Pembangunan Masa Depan", <https://www.kompasiana.com/frwirasandjaya/5d64aecf097f362b5e02fce2/sejarah-papua-dan-strategi-pembangunan-masa-depan?page=all>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

Freddy Numberi, "Freeport, Sejarah Kelam Amerika di Indonesia", [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/166642-\[_Konten_\]-freeport%20masalalu%20kelam0001.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/166642-[_Konten_]-freeport%20masalalu%20kelam0001.pdf), diakses pada tanggal 21 September 2019.

Gecko Project, "Bagaimana Perusahaan Memanipulasi Adat Untuk Merampas Tanah di Papua", <https://geckoproject.id/bagaimana-perusahaan-memanipulasi-adat-untuk-merampas-tanah-di-papua-b2285502f8dc>, diakses pada tanggal 22 September 2019.

Indonesian Stock Exchange, Profil Perusahaan Tercatat, <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Kajian Lingkungan Freeport, <https://ptfi.co.id/id/environmental-performance>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korporasi>, diakses pada tanggal 31 Mei 2020.

Komnas HAM, "KOMNAS HAM Sampaikan Rekomendasi ke PT Freeport", diakses di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/21/1034/komnas-ham-sampaikan-rekomendasi-ke-pt-freeport.html> pada 20 Januari 2020, pkl. 14:54 WIB.

Kontan, "Suku Amungme Ajukan Banding Kasus Freeport", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/12052985/suku.amungme.gugat.freeport.ke.pn.selatan> pada 28 Desember 2019.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tentang Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia 2014 "Menatap Ke Depan".

Liputan Khusus Freeport, JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur, terdapat di <https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/lisapease>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Data.com

Lokataru Foundation, “Pemberitahuan Gugatan Perwakilan Kelompok Karyawan Freeport Ke Bpjs Pusat, Bpjs Papua Dan PT Freeport Indonesia, diakses di <https://lokataru.id/pemberitahuan-gugatan-perwakilan-kelompok-karyawan-freeport-ke-bpjs-pusat-bpjs-papua-dan-pt-freeport-indonesia/> pada 20 Januari 2020.

Mas Achmad Daniri, “Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam *Seminar Sehari ‘A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR,’* 23 Agustus 2006.

Melki Pangaribuan, “LSM Papua Minta RI dan Freeport Penuhi Hak Suku Amungme-Kemoro”, diakses di <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lsm-papua-minta-ri-dan-freeport-penuhi-hak-suku-amungme-kamoro> pada 17 Januari 2020, pkl. 09:23 WIB.

Pojok Bogor, “149 Karyawan Dipecat Sepihak PT. Liebra Permana, SPN Beberkan Pelanggaran Perusahaan”, diakses di <https://bogor.pojoksatu.id/baca/149-karyawan-dipecat-sepihak-pt-liebra-permana-spn-beberkan-pelanggaran-perusahaan>.

PT Freeport Indonesia, “Kebijakan Lingkungan”, diakses di <https://ptfi.co.id/id/environmental-policy> pada tanggal 10 Januari 2020, pkl. 09:07 WIB.

Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, Terbit Hari Selasa tanggal 21 Desember 2004.

S.K. Matthews, “The Origin And Development Of Human Rights In The Global Scenario”, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/72649/8/08_chapter%201.pdf, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

Surat Kabar Sinar Keadilan, “Ingat, Banyak Pengrusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM oleh PT. Freeport Ingat, Banyak Pengrusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM oleh PT. Freeport”, <https://sinarkeadilan.com/ingat-banyak-pengrusakan-lingkungan-dan-pelanggaran-ham-oleh-pt-freeport/>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

Taufik Hidayat, “Insiden Freeport Terkait Rebutan Bisnis Militer-Polisi”, <https://news.okezone.com/read/2009/07/14/1/238647/insiden-freeport-terkait-rebutan-bisnis-militer-polisi>, diakses pada tanggal 21 September 2019.

Tirto, “Freeport di Papua ialah Warisan Daripada Soeharto”, diakses di <https://tirto.id/freeport-di-papua-ialah-warisan-daripada-soeharto-cjrC> pada 21 Januari 2020, pk1. 07:45 WIB.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia v. Republic of Indonesia et al.,
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
384/PDT.G/2006/PN.JKT.Pst (27 November 2007).